

**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS SOSIAL**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al - Bantani, Palima Kec. Curug No. Telp. (0254) 209955 Fax. (0254) 219784
Kota Serang - Banten 42171

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka kami dapat **Menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sosial Provinsi Banten Tahun 2023.**

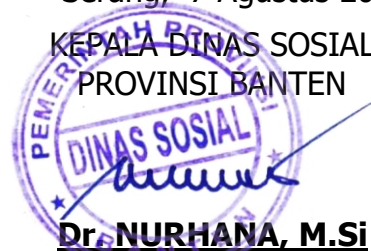
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 ini memuat tentang dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk masa periode 1 (satu) tahun, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Banten Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 7 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BANTEN



Dr. NURHANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641010 198902 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftarisi	II
DaftarTabel	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencanadan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	34
3.2 Tujuandan Sasaran Rencana Kerja	26
3.3 Program dan Kegiatan	37
3.3.1 Visi	37
3.3.2 Misi	38
3.3.3 Kebijakan	39
3.3.4 Program	40
3.3.5 Kegiatan	42
BAB IV RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN.....	54
4.1 Rencana Kerja Pendanaan OPD	54
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Penutup.....	54

DAFTAR TABEL

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.....	7
	Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra s/d Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Banten	7
	Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Banten	32
	Tabel 2.4 Review Terhadap RKPd Perubahan Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Banten	29
	Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kabupaten/Kota Tahun 2023	46
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	51
	Tabel 3.3 Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023.....	54
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD DAERAH	51
	Tabel 3.3 Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 OPD adalah Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD Perubahan.

Dinas Sosial Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial, berkewajiban menyiapkan dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2022 - 2026, mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2022 - 2026, yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023. Dinas Sosial Tahun 2022 - 2026 serta Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023.

Untuk Tahun 2023 Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten akan memasuki tahun ke - 1 dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 -2026, dalam rangka mewujudkan Visi Dinas, yaitu : ***“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”*** yang dijabarkan kedalam Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa;

Sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Sosial tersebut, dengan memperhatikan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Banten Tahun 2023, yaitu : " *Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari*" maka isu penting dan masalah mendesak Provinsi Banten Tahun 2023 yang menjadi lingkup kewenangan penanganan Dinas Sosial adalah Masalah Kemiskinan yang juga merupakan akar masalah dari timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan isu penting dan permasalahan tersebut, maka kemiskinan juga merupakan prioritas pembangunan yang menjadi fokus Dinas Sosial adalah prioritas ke- 1 (Satu) dari prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2023 yaitu " ***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Berahlak Mulia Berdudaya, Sehat dan Cerdas*** ".

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Penanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahunan Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten untuk dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai Prioritas Pembangunan Provinsi Banten;
2. Menetapkan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran Perubahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja bagi seluruh unsur pelaku pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilingkungan Dinas Sosial provinsi Banten;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Dinas Sosial Tahun 2023;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten (Rencana Kerja tahunan);
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk Anggaran Perubahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Kata Pengantar

Daftarisi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten dan menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian terhadap terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD Perubahan tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Dinas Sosial Provinsi Banten yang sudah disahkan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan program dan kegiatan.

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 merupakan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

BABIV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun lalu dengan capaian kinerja renstra OPD ditunjukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan mengidentifikasi realiasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapinya, pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian. Evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Renja Perubahan) Dinas Sosial dan capaian Renstra sampai dengan tahun 2023 dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1 (T-C.29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3		4		6	6	7
Dinas Sosial (Induk)									
1	URUSAN PEMERINTAHAN								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1.06.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangat Daerah Thn 2022	Perkiraanan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realiasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4			6	6	7
Dinas Sosial (Induk)									
1.06.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.06.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.06.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraanan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realiasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3		4		6	6	7
Dinas Sosial (Induk)									
1.06.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			100%			100%
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			100%			100%
1.06.01.1.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1	100%			100%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket			100%			100%
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77 Orang	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	77 Orang	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraanan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realiasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4			6	6	7	
Dinas Sosial (Induk)										
1.06.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12	Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	5	Unit	5 Unit	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1	Paket	1 Paket	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	12	Bulan	12 Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	12	Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12	Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12	Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraanan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realiasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3		4		6	6	7		
Dinas Sosial (Induk)											
1.06.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit				100%		100%		
1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Unit				100%		100%		
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1 Paket				100%		100%		
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	3	Unit	3	Unit	100%	1 Kegiatan	100%	
1.06.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	12	Laporan	12	Laporan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit				100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112 Unit				100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	12	Bulan	12	Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraanan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3	4			6	6	7		
Dinas Sosial (Induk)											
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										
1.06.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	250	Orang	250	Orang	100%	150 Orang	150 Orang	100%
1.06.02.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi										
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	850 Orang	213	Orang	213	Orang	100%	974 Orang	974 Orang	100%
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	155 Orang	155	Orang	155	Orang	100%	155 Orang	155 Orang	100%
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Keluarga	265	Orang	256	Orang	100%	61 Orang	61 Orang	100%
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	7 Lembaga					100%	70 Orang	70 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraanan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3				6	6	7	
Dinas Sosial (Induk)										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN									
1.06.03.1.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal									
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	60 Orang				100%	60 Orang	60 Orang	100%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.1.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti									
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Penyediaan Permakanan	600 Orang				100%	1.013 Orang	1.013 Orang	100%
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Penyediaan Alat Bantu	50 Orang	20	Orang	20	100%	50 Orang	50 Orang	100%
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	60 Orang	45	Orang	45	100%	60 Orang	60 Orang	100%
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40 Orang	50	Orang	50	100%	40 Orang	40 Orang	100%
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen				100%	15 Orang	15 Orang	100%
1.06.04.1.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti									
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Terlaksananya Penyediaan Makanan	600 Orang				100%	1.532 Orang	1.532 Orang	100%
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	120 Orang	80	Orang	80	100%	120 Orang	120 Orang	100%
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16 Orang	15	Orang	15	100%			100%
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16 Orang				100%			100%
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Terlaksananya Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	30 Orang	5	Orang	5	100%	5 Orang	5 Orang	100%
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Dokumen				100%	40 Orang	40 Orang	100%
1.06.04.1.03	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti									
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan	Terlaksananya Penyediaan Makanan	600 Orang				100%	3000 Orang	3000 Orang	100%
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	270 Orang	135	Orang	135	100%	268 Orang	268 Orang	100%
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16 Orang				100%			100%
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16 Orang				100%			100%
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1 Dokumen				100%	40 Orang	40 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraanan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realiasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3	4			6	6	7		
Dinas Sosial (Induk)											
1.06.04.1.05	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti										
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	180 Orang	160	Orang	160	Orang	100%	4 Panti	4 Panti	100%
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan ke Daerah Asal	125 Orang	180	Orang	180	Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Terlaksananya koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1 Dokumen					100%	65 Orang	65 Orang	100%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
1.06.05.1.01	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal										
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI	5 Orang					100%	5 Orang	5 Orang	100%
1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	5 Orang					100%	5 Orang	5 Orang	100%
1.06.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi										
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000 Keluarga	50.000	Keluarga	50.000	Keluarga	100%	50.000 KK	50.000 KK	100%
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Keluarga	50.000	Keluarga	50.000	Keluarga	100%	100 %	100 %	100%
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	720 Orang	50.000	Keluarga	50.000	Keluarga	100%	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	100%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										
1.06.06.1.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi										
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Perumahan	400 Orang	250	Orang	250	Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100%
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Terlaksananya Penyediaan Sandang	300 Orang	250	Orang	250	Orang	100%	300 Orang	300 Orang	100%
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terlaksananya Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	120 Unit	200	Orang	200	Orang	100%	200 Orang	200 Orang	100%
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	400 Orang	600	Orang	600	Orang	100%	300 Orang	300 Orang	100%
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedanya Pelayanan Dukungan Psikososial	300 Orang	200	Orang	200	Orang	100%	300 Orang	300 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Taget dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3		4		6	7	
Dinas Sosial (Induk)									
UPTD Perlindungan Sosial									
1.06.01									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1.06.01.1.03									
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			100%			100%
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			100%			100%
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			100%			100%
1.06.01.1.06									
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.07									
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit					100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.08									
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.09									
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit					100%	1 Kegiatan
1.06.04									
PROGRAM REABILITASI SOSIAL									
1.06.04.1.02									
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti									
1.06.04.1.02.01	Penyediaan Makanan	Terlaksananya Penyediaan Makanan	20 Orang	20	Orang	20	Orang	100%	30 Orang
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Sandang	Terlaksananya Penyediaan Sandang	20 Orang	20	Orang	20	Orang	100%	30 Orang
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terlaksananya Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	20 Orang	20	Orang	20	Orang	100%	30 Orang
1.06.04.1.02.04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	20 Orang	20	Orang	20	Orang	100%	30 Orang
1.06.04.1.02.05	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	20 Orang	20	Orang	20	Orang	100%	30 Orang
1.06.04.1.02.06	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	20	Orang	20	Orang	100%	30 Orang
1.06.04.1.02.07	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20 Orang	20	Orang	20	Orang	100%	30 Orang
1.06.04.1.02.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	40 Orang
1.06.04.1.03									
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti									
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan	Terlaksananya Penyediaan Makanan	60 Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60 Orang
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Terlaksananya Penyediaan Sandang	60 Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60 Orang
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Terlaksananya Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	60 Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60 Orang
1.06.04.1.03.04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	60 Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60 Orang
1.06.04.1.03.05	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	60 Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60 Orang
1.06.04.1.03.06	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60 Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60 Orang
1.06.04.1.03.07	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan	18 Orang	18	Orang	60	Orang	100%	60 Orang
1.06.04.1.03.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	40 Orang

Kode	Urusan/Program/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Keluaran Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 1 Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Prgram dan kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022			
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8			
Dinas Sosial (Induk)											
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial											
1.06.01											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
1.06.01.1.03											
Kegiatan Administrasi Barang											
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksanakannya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen				100%		100%		
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanakannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				100%		100%		
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				100%		100%		
1.06.01.1.06											
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksanakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksanakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksanakannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksanakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.07											
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanakannya Peralatan Mesin Lainnya	9 Unit	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanakannya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Unit				100%		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanakannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Unit				100%		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.08											
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	12	Bulan	12	Bulan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.06.01.1.08.03	Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanakannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.09											
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	12	Bulan	12	Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.06.04											
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
1.06.04.1.01											
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti											
1.06.04.1.01.01	Bantuan Makanan	Terlaksanakannya Penyediaan Makanan	30 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Terlaksanakannya Penyediaan Sandang	30 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terlaksanakannya Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	30 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
1.06.04.1.01.04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksanakannya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
1.06.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	46 Orang	46 Orang	100%
1.06.04.1.04											
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti											
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Makanan	Terlaksanakannya Penyediaan Makanan	50 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	85 Orang	85 Orang	100%
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Terlaksanakannya Penyediaan Sandang	50 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	85 Orang	85 Orang	100%
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terlaksanakannya Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	50 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	85 Orang	85 Orang	100%
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksanakannya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	85 Orang	85 Orang	100%
1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksanakannya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	50 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	85 Orang	85 Orang	100%
1.06.04.1.04.08	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terlaksanakannya Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	25 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	25 Orang	25 Orang	100%
1.06.04.1.04.09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksanakannya Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	25 Orang	25 Orang	100%
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksanakannya Pemulangan ke Daerah Asal	50 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	85 Orang	85 Orang	100%
1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	Terlaksanakannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	40 Orang	40 Orang	100%

➤ PRORAM DAN KEGIATAN

➤ Realisasi Keuangan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan dilakukan terhadap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan visi dan misi sebagai bahan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi program kegiatan dilaksanakan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan sampai pada Bulan Juli 2023 dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran;

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023.

No.	Sub Kegiatan / Tolok Ukur/Rincian	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik %		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran [Rp.] [4]-[9]		Contra Post	Hambatan /Masalah
					Tertimbang Fisik	Tertimbang Kegiatan [5x6]	SP2D s/d Bulan Laporan	SPJ s/d Bulan Laporan	%		%		
1	2	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11,00	12		13	14
I.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	428.910.500	73,17			40,62	124.218.058,00	124.218.058,00	28,96	275.892.442	64,32		
	1. Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2023	16.327.500	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327.500	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.105.500	0,36			0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.500	100,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.222.000	2,43			0,00	0,00	0,00	0,00	14.222.000	100,00		
	2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023	16.713.200	2,85	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.713.200	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.491.200	0,43			-	0,00	0,00	0,00	2.491.200	100,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.222.000	2,43			-	0,00	0,00	0,00	14.222.000	100,00		
	3. Forum Renja OPD Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2024	112.725.000	19,23	-	100,00	19,23	110.725.000,00	110.725.000,00	98,23	2.000.000	1,77		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.225.000	0,55		100,00	0,55	3.225.000	3.225.000	100,00	-	-	5.721.468	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000	2,35		100,00	2,35	12.000.000	12.000.000	86,96	1.800.000	13,04		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.700.000	16,33		100,00	16,33	95.500.000	95.500.000	99,79	200.000	0,21		
	4. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023	41.460.000	7,07	-	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	12.660.000	30,54		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.660.000	0,62		50,00	0,31	0,00	0,00	0,00	3.660.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	1,54		50,00	0,77	0,00	0,00	0,00	9.000.000	100,00		
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.200.000	3,28		50,00	1,64	-	-	0,00	19.200.000	100,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.600.000	1,64		50,00	0,82	0,00	0,00	0,00	9.600.000	100,00		
	5. Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan IKU Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024	4.440.000	0,76	-	50,00	0,38	1.753.200	1.753.200	28,68	2.686.800	60,51		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.190.000	0,37		50,00	0,19	628.200	628.200	28,68	1.561.800	71,32	3.346.590	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000	0,38		50,00	0,19	1.125.000	1.125.000	50,00	1.125.000	50,00		

No.	Sub Kegiatan /Tolok Ukur/Rincian	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik %		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran [Rp.] [4]-[9]		Contra Post	Hambatan /Masalah
					Tertimbang Fisik	Tertimbang Kegiatan [5x6]	SP2D s/d Bulan Laporan	SPJ s/d Bulan Laporan	%		%		
1	2	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11,00	12		13	14
6.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024	10.175.000	1,74	-	100,00	1,74	0,00	0,00	0,00	10.175.000	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.800.000	1,16		100,00	1,16	0,00	0,00	0,00	6.800.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000	0,58		100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	3.375.000	100,00		
7.	Rapat Koordinasi Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2023	22.825.000	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825.000	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.225.000	0,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000	100,00		
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000	1,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000	100,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000	1,28		0,00	0,00	0,00		0,00	7.500.000	100,00		
8	Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023	14.925.000	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.000	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.125.000	0,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000	100,00		
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000	1,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000	100,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.400.000	0,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000	100,00		
9	Sosialisasi Gender Analysis Pathway (GAP) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2023	53.986.800	9,21	-	25,00	4,61	10.089.858	10.089.858	18,69	43.896.942	81,31		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.586.800	1,12		50,00	0,56	1.868.268	1.868.268	28,36	4.718.532	71,64		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	1,54		50,00	0,77	2.221.590	2.221.590	24,68	6.778.410	75,32		
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.400.000	6,55		50,00	3,28	6.000.000	6.000.000	15,63	32.400.000	84,38		
10	Sosialisasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2024	20.125.000	3,43	-	100,00	3,43	-	-	0,00	20.125.000	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.225.000	0,21		100,00	0,21	-	-	0,00	1.225.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0,77		100,00	0,77	-	-	0,00	4.500.000	100,00		
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000	1,64		100,00	1,64	-	-	0,00	9.600.000	100,00		

No.	Sub Kegiatan /Tolok Ukur/Rincian	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik %		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran [Rp.] [4]-[9]		Contra Post	Hambatan /Masalah
					Tertimbang Fisik	Tertimbang Kegiatan [5x6]	SP2D s/d Bulan Laporan	SPJ s/d Bulan Laporan	%	%			
1	2	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11,00	12		13	14
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.800.000	0,82		100,00	0,82	0,00	0,00	0,00	4.800.000	100,00		
11	[#] Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial Tahun 2022	49.900.000	8,51	-	25,00	2,13	0,00	0,00	0,00	49.900.000	100,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.900.000	8,51		25,00	2,13	0,00	0,00	0,00	49.900.000	100,00		
12	Rapat Konsultasi Perencanaan dan Evaluasi Program Tahun 2023 - 2024	65.308.000	11,14	-	50,00	5,57	1.650.000	1.650.000	2,53	63.658.000	97,47		
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.606.000	8,12	-	50,00	4,06	-	-	0,00	47.606.000	100,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.702.000	3,02	-	50,00	1,51	1.650.000	1.650.000	9,32	16.052.000	90,68		
II.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.440.000	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000	92,22		
1.	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024	25.440.000	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000	92,22		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.460.000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000	100,00		
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.000.000	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	100,00		
	- Belanja Lembur	1.980.000	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000	100,00		
III.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.440.000	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000	92,22		
1.	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023	25.440.000	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.000	92,22		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.460.000	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	1,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000	100,00		
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.000.000	0,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	100,00		
	- Belanja Lembur	1.980.000	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000	100,00		
IV.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.440.000	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.000	87,18		
1.	Fasilitasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024	15.440.000	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.000	87,18		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.460.000	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000	100,00		
	- Belanja Lembur	1.980.000	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000	100,00		

No.	Sub Kegiatan /Tolok Ukur/Rincian	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik %		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran [Rp.] [4]-[9]		Contra Post	Hambatan /Masalah
					Tertimbang Fisik	Tertimbang Kegiatan [5x6]	SP2D s/d Bulan Laporan	SPJ s/d Bulan Laporan	%	%			
1	2	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11,00	12	%	13	14
V.	<u>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</u>	15.440.000	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.000	87,18		
1.	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023	15.440.000	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.000	87,18		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.460.000	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000	100,00		
	- Belanja Lembur	1.980.000	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000	100,00		
VI.	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	57.630.000	9,83	-	50,00	4,92	11.022.600,00	11.022.600,00	19,13	46.607.400	80,87		
1.	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan Dinas Sosial	57.630.000	9,83	-	50,00	4,92	11.022.600,00	11.022.600,00	19,13	46.607.400	80,87		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.030.000	1,54		50,00	0,77	1.572.600,00	1.572.600,00	17,42	7.457.400	82,58		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000	4,61		50,00	2,30	6.750.000,00	6.750.000,00	25,00	20.250.000	75,00		
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.600.000	3,69		50,00	1,84	2.700.000,00	2.700.000,00	12,50	18.900.000	87,50		
VII.	<u>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	17.850.000	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000	100,00		
1.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023	5.950.000	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.950.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000	100,00		
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023	5.950.000	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.950.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000	100,00		
3.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023	5.950.000	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.950.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000	100,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000	100,00		
JUMLAH		586.150.500	100,00	44,62		45,54	135.240.658,00	135.240.658,00	23,07	450.909.842	76,93		

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Tahun 2023 sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2023 Perubahan pelaksanaan program kegiatan terdiri dari 6 (Tujuh) program dan 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan dengan pagu anggaran sejumlah Rp.135.240.658.00,- sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 realisasi keuangan direncanakan mencapai 100,00 % dan realisasi fisik atau realisasi target indikator kinerja mencapai 100,00 %. Dengan rincian masing - masing anggaran per program sebagai berikut :

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial yang mempunyai sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2023, Sedangkan penetapan indikator kinerja berdasarkan kepada :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
3. Pencapaian Millenium Development Goals (MDG'S).

Untuk capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Banten periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 - 2026, sebagaimana tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA TUGAS DAN FUNGSI/PERANGKAT DAERAH	SPM/STANDAR NASIONAL TARGET IKK	TARGET IKK	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALIS
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	100											
-	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	100		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah	100		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Persentase Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Program Rehabilitasi Sosial												
-	Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100											
-	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100		663	718	723	883	693	5.524	685	2.743	170,89	
-	Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100		368	378	348	473	368	4.660	220	1.643	132,12	
-	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100		175	215	225	250	215	141	340	350	192,31	
3	Program Pemberdayaan Sosial												
-	Cakupan PSKS yang Meningkatkan Partisipasi Sosialnya	100			1.483	1.483	1.483	5.755	1.671	627	1.089	1.692	
-	Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	Kab/Kota		1.105	1.105	1.105	1.145	505	626	1.314	100	
-	Jumlah Keluarga Kepahlawanan, Keberintisan, Keuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang dibina dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	Kabupaten		228	228	400	366	122	213	228	160	
-	Jumlah Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	Kota Kab/Kota		150	150	4.250	160	-	250	150	2.833,33	

NO	INDIKATOR KINERJA TUGAS DAN FUNGSI/PERANGKAT DAERAH	SPM/STANDAR NASIONAL TERGET IKK	TARGET IKK	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALIASASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALIS
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	<i>Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS</i>	100											
	- Jumlah Dokumen Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS yang dikelola				100	100	100	100	100	100	100	100	
	<i>Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial</i>												
	- Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100			50.000	50.000	50.000	30.894	49.511	48.312	49.958	50.000	
	<i>Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi</i>												
	- Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	2.152	1.800	1.630	
5	Program Penanganan Fakir Miskin												
	<i>Cakupan Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota</i>												
	- Jumlah Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Lintas Kabupaten yang diberdayakan	100			8	8	8	8	8	8	8	8	
	- Jumlah Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Lintas Kota yang diberdayakan	100			4	4	4	4	4	4	4	4	
	- Jumlah Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100			4	4	4	4	4	4	4	4	
6	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti												
	<i>Cakupan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar di Dalam Panti</i>												
	- Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100			100	100	100	100	100	100	100	100	
	- Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100			60	60	60	60	60	60	60	60	
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti												
	<i>Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Khususnya Gelandangan dan Pengemis) dan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	
	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100			55	20	20	20	55	65	20	30	
	Persentase Tuna Sosial (Khususnya Gelandangan dan Pengemis) yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100			55	40	40	40	55	65	10	25	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial tersebut dilaksanakan Program Kegiatan melalui Bidang Teknis baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial RI, dengan Koordinasi intensif dalam penentuan sasaran target dilokasi melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang termasuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum maksimal dibandingkan dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial yang merupakan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik yang telah, sedang dan masih akan dihadapi secara umum adalah masalah Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut :

1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai data Tahun 2021 mencapai 961.118 PMKS yang terbagi dalam kriteria permasalahan :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Ketelantaran;
 - c. Kecacatan;
 - d. Ketunaan Sosial;
 - e. Keterpencilan;
 - f. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - g. Korban bencana.
2. Jangkauan pelayanan program pembangunan bidang kesejahteraan social yang terdiri dari Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial masih terbatas bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada dan harus ditangani;
3. Peran Masyarakat/Organisasi Sosial dan Dunia Usaha belum terlaksana optimal;
4. Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan Kesejahteraan Sosial secara teknis dan praktis masih terbatas.

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, yang pada Awalnya akan berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum. Karena keberadaan Dinas Sosial Provinsi Banten sbagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten Tahun 2023 - 2026, yaitu : **“Banten Yang Maju Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** untuk mencapai Banten Maju dan Mandiri diantaranya dicirikan dengan meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan sosial masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas dan produktif.

Berdasarkan permasalahan dan dampaknya tersebut, maka tantangan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, agar mereka mampu dan mau berpartisipasi dan berperan sesuai fungsi sosialnya.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial tersebut, aspek yang dapat mendukung antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundang - Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
 - a. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lampiran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 nomor 3, Tambahan Lampiran Daerah Provinsi Banten nomor 40;
 - c. Peraturan Daerah Provisini Banten No 8 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial).
2. Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD baik melalui anggaran rutin, Hibah dan Bantuan Sosial serta anggaran dari APBN;
3. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat dioptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - c. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - e. Karang Taruna (KT);
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - g. Keluarga Pioner;
 - h. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 - i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - j. Penyuluh Sosial;
 - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - l. Dunia Usaha.

m. K3RS;

Sejalan dengan uraian tersebut, dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan bidang kesejahteraan sosial yaitu dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, maka sesuai dengan eksistensi Dinas Sosial dan isu pembangunan Provinsi Banten dalam RKPD Tahun 2021 adalah Masalah Kemiskinan, dimana masalah kemiskinan yang merupakan akar masalah dari timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk itu sebagai upaya dalam menjawab isu penting dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022, dilaksanakan upaya - upayanya antara lain :

1. Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Kemitraan sinergis dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui optimalisasi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mur Provinsi Banten Tahun 2023, Dinas Sosial Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran indikatif sejumlah Rp. 112.528.000.000,- (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah*) untuk melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Untuk rincian hasil analisa anggaran sesuai kebutuhan sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut;

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Banten

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUARAN							
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
DINAS SOSIAL					100.860.127.000	93.792.996.900				100.860.127.000	93.792.996.900	- 7.067.130.100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	38.777.560.700	33.438.679.600	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	38.777.560.700	33.438.679.600	- 5.338.881.100	
1.06.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	586.150.500	586.150.500	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	586.150.500	586.150.500	-	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	428.910.500	400.110.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	428.910.500	400.110.500	- 28.800.000	Berkurang
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.440.000	25.440.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.440.000	25.440.000	-	
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.440.000	25.440.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.440.000	25.440.000	-	
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.440.000	16.440.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.440.000	16.440.000	1.000.000	Bertambah
1.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.440.000	16.440.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.440.000	16.440.000	1.000.000	Bertambah
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	57.630.000	57.630.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	57.630.000	57.630.000	-	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	5 Dokumen	17.850.000	44.650.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	5 Dokumen	17.850.000	44.650.000	26.800.000	Bertambah
1.06.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	19.459.672.000	20.183.185.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	19.459.672.000	20.183.185.000	723.513.000	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Org/Bln	77 Org/Bln	18.616.597.000	19.450.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Org/Bln	77 Org/Bln	18.616.597.000	19.450.000.000	833.403.000	Bertambah
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	759.120.000	649.230.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	759.120.000	649.230.000	- 109.890.000	Berkurang
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	74.265.000	74.265.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	74.265.000	74.265.000	-	
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	-	
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.100.000	1.100.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.100.000	1.100.000	-	
1.06.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	990.000	990.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	990.000	990.000	-	
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000	1.100.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000	1.100.000	-	
1.06.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000	1.100.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000	1.100.000	-	
1.06.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	21.030.000	21.030.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	21.030.000	21.030.000	-	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALIS KEBUTUHAAN						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400			112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400			112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600		
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.300.000	10.300.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.300.000	10.300.000	-	
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.090.000	6.090.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.090.000	6.090.000	-	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.640.000	4.640.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.640.000	4.640.000	-	
1.06.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	85.999.000	85.999.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	85.999.000	85.999.000	-	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	61.950.000	61.950.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	61.950.000	61.950.000	-	
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	77 Orang	18.150.000	18.150.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	77 Orang	18.150.000	18.150.000	-	
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	77 Orang	77 Orang	5.899.000	5.899.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	77 Orang	77 Orang	5.899.000	5.899.000	-	
1.06.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.067.248.000	2.067.248.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.067.248.000	2.067.248.000	-	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.030.000	1.030.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.030.000	1.030.000	-	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	126.516.000	167.055.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	126.516.000	167.055.200	40.539.200 Bertambah	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.909.000	32.909.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.909.000	32.909.000	-	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	699.520.000	655.184.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	699.520.000	655.184.000	- 44.336.000 Berkurang	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.100.000.000	1.100.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.100.000.000	1.100.000.000	-	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	105.993.000	105.993.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	105.993.000	105.993.000	-	
1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.280.000	5.076.800	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.280.000	5.076.800	3.796.800 Bertambah	
1.06.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.725.699.950	743.305.850	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.725.699.950	743.305.850	- 1.982.394.100	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	- Unit	540.716.000	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	- Unit	540.716.000	-	- 540.716.000 Optimalisasi	
1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	1.445.190.200	3.512.100	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	1.445.190.200	3.512.100	- 1.441.678.100 Optimalisasi	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	92.836.000	92.836.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	92.836.000	92.836.000	-	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	646.957.750	646.957.750	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	646.957.750	646.957.750	-	
1.06.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5.563.354.800	5.563.354.800	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5.563.354.800	5.563.354.800	-	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	380.404.800	380.404.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	380.404.800	380.404.800	-	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.182.950.000	5.182.950.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.182.950.000	5.182.950.000	-	
1.06.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	8.268.406.450	4.188.406.450	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	8.268.406.450	4.188.406.450	- 4.080.000.000	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	115.230.000	115.230.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	115.230.000	115.230.000	-	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	20 Unit	20 Unit	313.820.000	313.820.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	20 Unit	20 Unit	313.820.000	313.820.000	-	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	112 Unit	76.320.000	76.320.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	112 Unit	76.320.000	76.320.000	-	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	7.143.592.200	3.063.592.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	7.143.592.200	3.063.592.200	- 4.080.000.000 Optimalisasi	
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	619.444.250	619.444.250	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	619.444.250	619.444.250	-	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALIS KEBUTUHAAN						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial	100 %	100 %	1.949.750.000	1.879.902.000	Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial	100 %	100 %	1.949.750.000	1.879.902.000	- 69.848.000	
1.06.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	220.000.000	187.812.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	220.000.000	187.812.000	- 32.188.000	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000	187.812.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000	187.812.000	- 32.188.000	Optimalisasi
1.06.02.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	100 %	1.729.750.000	1.692.090.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	100 %	1.729.750.000	1.692.090.000	- 37.660.000	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	850 Orang	850 Orang	737.358.250	737.358.250	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	850 Orang	850 Orang	737.358.250	737.358.250	-	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	155 Orang	155 Orang	558.000.000	558.000.000	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	155 Orang	155 Orang	558.000.000	558.000.000	-	
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Keluarga	30 Keluarga	350.500.000	312.840.000	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Keluarga	30 Keluarga	350.500.000	312.840.000	- 37.660.000	Optimalisasi
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	7 Lembaga	7 Lembaga	83.891.750	83.891.750	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	7 Lembaga	7 Lembaga	83.891.750	83.891.750	-	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	-	
1.06.03.1.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	-	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	75.000.000	75.000.000	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	75.000.000	75.000.000	-	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100 %	100 %	5.803.150.000	5.554.094.200	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100 %	100 %	5.803.150.000	5.554.094.200	- 249.055.800	
1.06.04.1.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	1.343.426.000	1.343.426.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	1.343.426.000	1.343.426.000	-	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang	300.000.000	300.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang	300.000.000	300.000.000	-	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	357.300.000	357.300.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	357.300.000	357.300.000	-	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	174.004.000	174.004.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	174.004.000	174.004.000	-	
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	484.622.000	484.622.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	484.622.000	484.622.000	-	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000	27.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000	27.500.000	-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAAN								
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
L.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06.04.1.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	652.818.000	453.872.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	652.818.000	453.872.000	- 198.946.000	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang	300.000.000	300.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang	300.000.000	300.000.000	-	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang	- Orang	198.946.000	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang	- Orang	198.946.000	-	- 198.946.000	Optimalisasi
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	10.500.000	10.500.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	10.500.000	10.500.000	-	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	58.926.000	58.926.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	58.926.000	58.926.000	-	
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Penganti Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	44.640.000	44.640.000	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Penganti Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	44.640.000	44.640.000	-	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	1 Dokumen	39.806.000	39.806.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	1 Dokumen	39.806.000	39.806.000	-	
1.06.04.1.03	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	3.130.292.000	3.092.682.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	3.130.292.000	3.092.682.000	- 37.610.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang	2.700.000.000	2.700.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang	2.700.000.000	2.700.000.000	-	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang	227.838.000	190.228.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang	227.838.000	190.228.000	- 37.610.000	Optimalisasi
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	11.200.000	11.200.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	11.200.000	11.200.000	-	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	63.726.000	63.726.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	16 Orang	16 Orang	63.726.000	63.726.000	-	
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	127.528.000	127.528.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	127.528.000	127.528.000	-	
1.06.04.1.05	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	676.614.000	664.114.200	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	676.614.000	664.114.200	- 12.499.800	
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang	180 Orang	521.939.000	521.939.000	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang	180 Orang	521.939.000	521.939.000	-	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	125 Orang	125 Orang	124.675.000	124.675.000	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	125 Orang	125 Orang	124.675.000	124.675.000	-	
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	17.500.200	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	17.500.200	- 12.499.800	Optimalisasi
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100 %	100 %	53.054.802.500	51.563.567.300	Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100 %	100 %	53.054.802.500	51.563.567.300	- 1.491.235.200	
		Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100 %	100 %			Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100 %	100 %				
		Persentase Pegelolan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	100 %	100 %			Persentase Pegelolan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	100 %	100 %				
		Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 %	100 %			Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 %	100 %				
1.06.05.1.01	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	-	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	-	
1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	-	
1.06.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100 %	100 %	53.004.802.500	51.513.567.300	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100 %	100 %	53.004.802.500	51.513.567.300	- 1.491.235.200	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	50.000 Keluarga	27.500 Keluarga	33.123.287.500	31.632.052.300	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	50.000 Keluarga	27.500 Keluarga	33.123.287.500	31.632.052.300	- 1.491.235.200	Optimalisasi
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarga	704.609.000	704.609.000	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarga	704.609.000	704.609.000	-	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	720 Orang	720 Orang	19.176.906.000	19.176.906.000	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	720 Orang	720 Orang	19.176.906.000	19.176.906.000	-	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALIS KEBUTUHAHAN						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	100 %	100 %	1.199.863.800	1.281.753.800	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	100 %	100 %	1.199.863.800	1.281.753.800	81.890.000	
1.06.06.1.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	100 %	1.199.863.800	1.281.753.800	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	100 %	1.199.863.800	1.281.753.800	81.890.000	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	400 Orang	400 Orang	213.640.800	259.530.800	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	400 Orang	400 Orang	213.640.800	259.530.800	45.890.000	Bertambah
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang	111.100.000	111.100.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang	111.100.000	111.100.000	-	
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	120 Unit	120 Unit	493.184.800	529.184.800	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	120 Unit	120 Unit	493.184.800	529.184.800	36.000.000	Bertambah
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	400 Orang	400 Orang	266.359.200	266.359.200	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	400 Orang	400 Orang	266.359.200	266.359.200	-	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang	115.579.000	115.579.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang	115.579.000	115.579.000	-	
UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL					4.738.643.500	3.167.542.800				4.738.643.500	3.167.542.800	- 1.571.100.700	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	2.473.379.500	916.487.800	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	2.473.379.500	916.487.800	- 1.556.891.700	
1.06.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	21.030.000	21.030.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	21.030.000	21.030.000	-	
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.030.000	15.030.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.030.000	15.030.000	-	
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	-	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	-	
1.06.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	283.586.000	259.586.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	283.586.000	259.586.000	- 24.000.000	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.994.000	75.994.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.994.000	75.994.000	-	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.959.000	39.959.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.959.000	39.959.000	-	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.340.000	39.340.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.340.000	39.340.000	- 24.000.000	Berkurang
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.773.000	49.773.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.773.000	49.773.000	-	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	54.520.000	54.520.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	54.520.000	54.520.000	-	
1.06.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	100.000.000	136.936.600	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	100.000.000	136.936.600	36.936.600	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALIS KEBUTUHAAN						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	2	3	4	5	6	7	3	5	6	7	8	9	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400			112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400			112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600		
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000	136.936.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000	136.936.600	36.936.600	Bertambah
1.06.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	148.770.000	135.833.400	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	148.770.000	135.833.400	- 12.936.600	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	120.491.000	107.554.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	120.491.000	107.554.400	- 12.936.600	Berkurang
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	28.279.000	28.279.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	28.279.000	28.279.000	-	
1.06.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	1.919.993.500	363.101.800	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	1.919.993.500	363.101.800	- 1.556.891.700	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	8 Unit	8 Unit	105.441.800	105.441.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	8 Unit	8 Unit	105.441.800	105.441.800	-	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	58.940.000	58.940.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	58.940.000	58.940.000	-	
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1.755.611.700	198.720.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1.755.611.700	198.720.000	- 1.556.891.700	Optimalisasi
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %	2.265.264.000	2.251.055.000	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %	2.265.264.000	2.251.055.000	- 14.209.000	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %				
1.06.04.1.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	762.894.000	720.685.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	762.894.000	720.685.000	- 42.209.000	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	310.641.300	310.641.300	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	310.641.300	310.641.300	-	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	57.830.300	57.830.300	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	57.830.300	57.830.300	-	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	42.009.700	42.009.700	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	42.009.700	42.009.700	-	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	114.300.000	114.300.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	114.300.000	114.300.000	-	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan	25 Orang	25 Orang	7.906.100	7.906.100	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan	25 Orang	25 Orang	7.906.100	7.906.100	-	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	132.582.000	132.582.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	132.582.000	132.582.000	-	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	17.230.000	17.230.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	17.230.000	17.230.000	-	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2 Dokumen	1 Dokumen	80.394.600	38.185.600	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2 Dokumen	1 Dokumen	80.394.600	38.185.600	- 42.209.000	Optimalisasi
1.06.04.1.03	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	1.502.370.000	1.530.370.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial	100 %	100 %	1.502.370.000	1.530.370.000	28.000.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	1.072.424.300	1.071.514.800	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	1.072.424.300	1.071.514.800	- 909.500	Berkurang
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	195.113.500	195.066.100	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	195.113.500	195.066.100	- 47.400	Berkurang
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	81.671.200	81.587.200	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	81.671.200	81.587.200	- 84.000	Berkurang
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	71.570.000	71.336.900	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	71.570.000	71.336.900	- 233.100	Berkurang
1.06.04.1.03.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	60 Orang	10 Orang	2.247.000	720.000	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	60 Orang	10 Orang	2.247.000	720.000	- 1.527.000	Berkurang
1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	27.216.000	17.236.800	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	27.216.000	17.236.800	- 9.979.200	Berkurang
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	18 Orang	18 Orang	35.000.000	63.000.000	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	18 Orang	18 Orang	35.000.000	63.000.000	28.000.000	Bertambah
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.128.000	29.908.200	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.128.000	29.908.200	12.780.200	Bertambah

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALIS KEBUTUAHAN						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL				6.929.229.500	2.648.331.700				6.929.229.500	2.648.331.700	- 4.280.897.800	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	5.564.449.500	1.548.276.700	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	5.564.449.500	1.548.276.700	- 4.016.172.800	
1.06.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	21.030.000	21.030.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	21.030.000	21.030.000	-	
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12.550.000	12.550.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12.550.000	12.550.000	-	
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.120.000	3.120.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.120.000	3.120.000	-	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.360.000	5.360.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.360.000	5.360.000	-	
1.06.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	149.122.600	149.122.600	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	149.122.600	149.122.600	-	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.666.700	11.666.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.666.700	11.666.700	-	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.496.900	11.496.900	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.496.900	11.496.900	-	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.590.000	40.590.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.590.000	40.590.000	-	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.589.000	28.589.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.589.000	28.589.000	-	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	56.780.000	56.780.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	56.780.000	56.780.000	-	
1.06.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	1.214.202.800	114.202.800	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	1.214.202.800	114.202.800	- 1.100.000.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	114.202.800	114.202.800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	114.202.800	114.202.800	-	
1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	- Unit	1.100.000.000	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	- Unit	1.100.000.000	-	- 1.100.000.000	Optimalisasi
1.06.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	123.540.000	123.540.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	123.540.000	123.540.000	-	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	102.327.000	102.327.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	102.327.000	102.327.000	-	
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	21.213.000	21.213.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	21.213.000	21.213.000	-	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALIS KEBUTUHAAN						
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF		(+/-) (Rp.)	KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	APBD 2023	P-RKPD 2023		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	- 12.919.128.600	
1.06.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	4.056.554.100	1.140.381.300	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	4.056.554.100	1.140.381.300	- 2.916.172.800	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	61.800.000	61.800.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	61.800.000	61.800.000	-	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	23.081.300	23.081.300	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	23.081.300	23.081.300	-	
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3.971.672.800	1.055.500.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3.971.672.800	1.055.500.000	- 2.916.172.800	Optimalisasi
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.364.780.000	1.100.055.000				1.364.780.000	1.100.055.000	- 264.725.000	
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100 %	100 %			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100 %	100 %				
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %				
1.06.04.1.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	556.280.000	556.280.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	556.280.000	556.280.000	-	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	116.505.000	116.505.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	116.505.000	116.505.000	-	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	70.000.000	70.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	70.000.000	70.000.000	-	
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	10.060.000	10.060.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	10.060.000	10.060.000	-	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	294.563.000	294.563.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	294.563.000	294.563.000	-	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1 Dokumen	65.152.000	65.152.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1 Dokumen	65.152.000	65.152.000	-	
1.06.04.1.04	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	808.500.000	543.775.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	100 %	100 %	808.500.000	543.775.000	- 264.725.000	
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	151.020.000	100.680.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	151.020.000	100.680.000	- 50.340.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	155.655.000	103.770.000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	155.655.000	103.770.000	- 51.885.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	7.200.000	4.800.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	7.200.000	4.800.000	- 2.400.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	41.100.000	27.400.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	41.100.000	27.400.000	- 13.700.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	392.937.500	259.537.500	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	392.937.500	259.537.500	- 133.400.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	25 Orang	17 Orang	4.200.000	2.850.000	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	25 Orang	17 Orang	4.200.000	2.850.000	- 1.350.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	9.450.000	6.300.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang	9.450.000	6.300.000	- 3.150.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.500.000	17.000.000	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.500.000	17.000.000	- 8.500.000	Optimalisasi
1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			21.437.500	21.437.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			21.437.500	21.437.500	-	
JUMLAH					112.528.000.000	99.608.871.400				112.528.000.000	99.608.871.400	12.919.128.600	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten, dilaksanakan koordinasi perencanaan program Tahun 2023 melalui kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2023, kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Menginformasikan arah kebijakan program Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 yang mencakup Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran;
2. Menghimpun usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk Program Kegiatan Tahun 2023;
3. Sinkronisasi program kegiatan Provinsi dan kabupaten/kota terkait Program, Kegiatan, Sasaran, Target dan Lokasi.

Berdasarkan hasil Kegiatan tersebut, telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Arah kebijakan program dan kegiatan APBD Tahun 2023 pada Dinas Sosial Provinsi Banten telah diinformasikan kepada Kabupaten/Kota;
2. Seluruh Kabupaten/Kota telah menyampaikan usulan kegiatan untuk Tahun 2023, meskipun masih terdapat data yang belum lengkap pada beberapa usulan Kabupaten/Kota;
3. Untuk usulan kegiatan yang telah jelas lokasi dan sarasanya agar ditindaklanjuti dengan usulan melalui proposal secara berjenjang, dengan mencantumkan sasaran Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Usulan yang terhimpun dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota menjadi salah satu indikator dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk Tahun 2023, secara lengkap data usulan dari masing - masing Dinas Sosial Kabupaten/Kota pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kab/Kota Tahun 2023

Kode Perangkat Daerah	Prioritas Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume		Besaran Volume		Catatan
								Tahun n	Tahun n+1	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah							
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD							
			Persentase Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD							
			Persentase Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD							
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Tepat Waktu							
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Serang	Dokumen	3	3	6.600.000	11.100.000	
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Serang	Dokumen	9	10	256.145.500	600.876.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Serang				13.900.000	20.400.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Serang				13.900.000	20.400.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Serang				8.900.000	10.400.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Serang				8.900.000	10.400.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Serang	Dokumen	12	12	45.630.000	57.630.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	#VALUE!						
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Serang	unit	3	1	28.833.750	228.833.750	
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	#VALUE!						
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Serang	bulan	12	3	76.820.000	150.000.000	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Serang				97.060.000	111.368.000	
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Serang				46.400.000	60.000.000	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Serang				23.184.000	153.184.000	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Serang				203.040.000	303.040.000	
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Serang	kegiatan	7	7	366.144.800	380.404.800	
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Serang				4.561.950.000	4.562.950.000	
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran							

Kode Perangkat Daerah	Prioritas Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume		Besaran Volume		Catatan
								Tahun n	Tahun n+1	
		- Pemulangan ke Daerah Asal		8 Kabupaten/Kota	orang	120	125	124.675.000	124.675.000	
		- Penyediaan Permakanan		4 Kabupaten/Kota	panti	0	4		200.000.000	
		- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas							
		- Penyediaan Alat Bantu		8 Kabupaten/Kota	orang	45	50	143.000.000	157.300.000	
		- Penyediaan Permakanan		8 Kabupaten/Kota	orang	-	1.013		1.013.000.000	
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		8 Kabupaten/Kota	orang	10	20	102.678.000	157.300.000	
		- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		8 Kabupaten/Kota	orang	35	40			
		- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		8 Kabupaten/Kota	orang	35	40	445.322.000	459.622.000	
		Pemberdayaan Sosial	Cakupan PSKS yang Meningkatkan Partisipasi Sosialnya							
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten							
		- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		8 Kabupaten/Kota	orang	155	974	341.000.000	1.082.501.000	
		- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		8 Kabupaten/Kota	orang	264	61	545.870.000	245.870.000	
		- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		8 Kabupaten/Kota	orang	30	70	14.879.000	50.879.000	
		- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		8 Kabupaten/Kota	orang	222	350	192.725.500	500.500.000	
				-						
				-						
		- Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		8 Kabupaten/Kota	orang	254	150	119.704.000	400.000.000	
				-						
		Penanganan Bencana	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi							
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlindunginya Korban Bencana Alam dan Sosial							
		- Penyediaan Sandang		8 Kabupaten/Kota	Orang	600	800	168.400.000	421.000.000	
		- Pelayanan Dukungan Psikososial		8 Kabupaten/Kota	Orang	600	800	147.390.000	368.475.000	
		- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		8 Kabupaten/Kota	Orang	400	600	157.500.000	393.750.000	
		- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		8 Kabupaten/Kota	Orang	500	700	326.450.000	816.125.000	
		- Penyediaan Permakanan		8 Kabupaten/Kota	Orang	200	400	242.500.000	606.250.000	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS							
			Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS							
			Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial							
			Cakupan Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/ Kota							

Kode Perangkat Daerah	Prioritas Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume		Besaran Volume		Catatan
						Besaran Volume	Besaran Volume	Tahun n	Tahun n+1	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							
		- Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Kota Serang	Dokumen	28	28	150.021.500	400.598.000	
					-					
					-					
					-					
		- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		8 Kabupaten/Kota	KK	50.000	50.000	57.974.154.000	75.000.000.000	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		8 Kabupaten/Kota	Kab/kota	8	8	6.775.000.000	7.452.500.000	
					-					
					-					
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kabupaten Lebak	kegiatan	1	1		224.967.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kabupaten Lebak	kegiatan	3	3	24.967.000	39.820.000	
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kabupaten Lebak				36.200.000	111.080.000	
		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kabupaten Lebak				11.080.000	300.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kabupaten Lebak	kegiatan	7	7	80.439.000	88.483.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Kabupaten Lebak				9.763.000	10.740.000	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Lebak				18.216.000	20.038.000	
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kabupaten Lebak				9.750.000	10.725.000	
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kabupaten Lebak				53.835.000	59.219.000	
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kabupaten Lebak				4.502.000	4.952.000	
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kabupaten Lebak				15.456.000	19.330.000	
		Rehabilitasi Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Khususnya Gelandang dan Pengemis) dan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti							
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di da	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Dalam Panti							
		- Penyediaan Permakanan		Kabupaten Lebak	orang	25	50	68.405.000	136.810.000	
		- Penyediaan Sandang		Kabupaten Lebak	orang	25	50	47.571.000	99.070.000	
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Kabupaten Lebak	orang	25	50	4.900.000	16.900.000	
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Kabupaten Lebak	orang	25	50	14.450.000	54.450.000	
		- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		Kabupaten Lebak	orang	25	50	225.096.000	450.192.000	
		- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		Kabupaten Lebak	orang	25	50	5.000.000	15.000.000	

Kode Perangkat Daerah	Prioritas Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume		Besaran Volume		Catatan
								Tahun n	Tahun n+1	
		- Penyediaan Sandang		Kota Serang	orang	15	20	16.506.000	33.012.000	
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		Kota Serang	orang	15	20	15.347.500	30.695.000	
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Kota Serang	orang	15	20	54.700.000	109.400.000	
		- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		Kota Serang	orang	15	20	391.500	783.000	
		- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Kota Serang	orang	15	20	73.768.000	147.536.000	
		- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Kota Serang	orang	15	20	8.622.000	17.244.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026. Memperhatikan Visi Dinas Sosial tahun 2023 - 2026, yaitu : “ *Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa* “ yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial melalui pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yang dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan perundang - undangan tersebut Kebijakan Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial, yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Jaminan Sosial, merupakan jaminan sosial yang yang diberikan dalam bentuk Asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
3. Pemberdayaan Sosial, dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan peran serta lembaga dan perseorangan sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Perlindungan Sosial, yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Sedangkan program - program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tersebut ditujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan capaian indikator yang diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan program Prioritas Nasional mencakup :

1. Program keluarga Harapan (PKH);
2. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak;
3. Program Rehabilitasi dan Perlindungan terhadap Orang Dengan Kecacatan;
4. Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten berdasarkan visi misi pembangunan daerah mendukung mewujudkan visi mempunyai tema “ *Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa* “

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 perlu memperhatikan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2023 – 2026. Hal tersebut penting dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan terlaksananya perencanaan pembangunan yang berkesinambungan antar dokumen perencanaan.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026, dari 5 (lima) Misi dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke 3 (Tiga) yaitu; Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;.

Tujuan:

- Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari;.

Sasaran:

- Adapun **Sasaran** Dinas Sosial Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pelayanan Sosial

1) “Meningkatnya Pelayanan Sosial (Melalui Pemenuhan SPM Sosial)”, mempunyai sasaran untuk “Meningkatnya jumlah rumah tangga miskin, PMKS dan penanganan jumlah PMKS yang mendapat pelayanan sosial”.

b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan

1) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan”, mempunyai sasaran untuk “Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur dan Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial”.

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026, sebagaimana pada tabel berikut.;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Komprehensif dan Profesional	1. Meningkatnya Pelayanan Sosial (Melalui Pemenuhan SPM Sosial)	a. Persentase Penanganan Jumlah PMKS	5,40 %	5,42 %	5,47 %	5,51 %
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Sosial yang Baik dan Bersih	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	b. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70 - 80 Nilai	70 - 80 Nilai	70 - 80 Nilai	70 - 80 Nilai

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada Awal periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud Awal yang diinginkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 5 tahun mendatang (Awal periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh OPD di masa mendatang.

Memasuki era pembangunan lima tahun ketiga, Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2023 - 2026, yaitu : **“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** untuk mencapai Banten Maju dan mandiri diantaranya dicirikan dengan meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan sosial masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas dan produktif.

Hal ini menjadi penting karena kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pembangunan secara umum dan juga merupakan tujuan utama pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka semakin memungkinkan tercapainya Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa pada Awal periode perencanaan (tahun 2026). Uraian tersebut mencerminkan betapa strategisnya kedudukan dan peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam mewujudkan harapan pencapaian pembangunan 2023 - 2026.

Sejalan dengan harapan tersebut, isu strategis pembangunan Dinas Sosial Provinsi Banten pada periode 2023 - 2026 sesuai dengan eksistensi Dinas Sosial Provinsi Banten melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, terfokus pada optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial, peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial, serta kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial. Isu strategis tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dan orientasi yang menjadi pokok tindak lanjut atas pencapaian pembangunan bidang sosial yang telah diupayakan Dinas Sosial Provinsi Banten selama kurun waktu 2023 - 2026.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, peran Dinas Sosial Provinsi Banten tidak terlepas dari kerangka untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang sosial. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam bidang sosial dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026, maka Dinas Sosial menetapkan Visi 2023 - 2023 sebagai berikut :

*“ Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang berahlak Mulia
Berbudaya Sehat dan Cerdas ”*



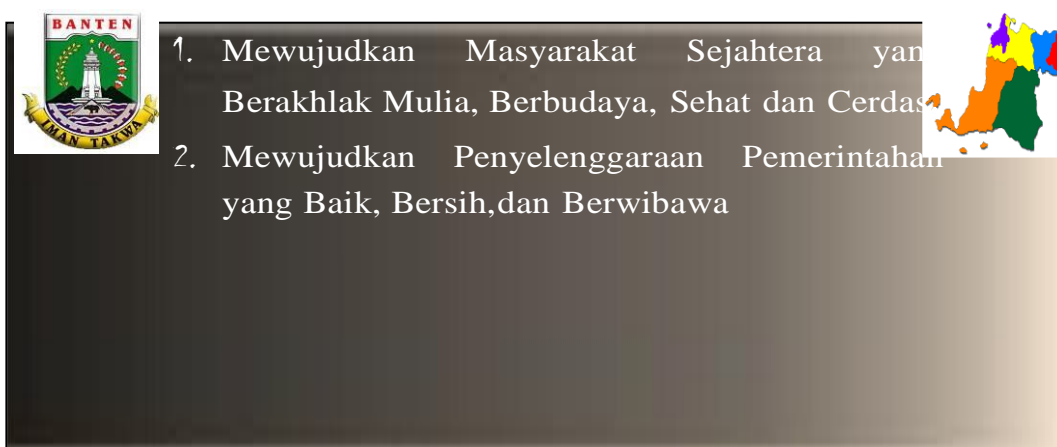
Visi tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten ditujukan untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi rakyat Banten khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

3.3.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai - nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten 2023 - 2026 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, khususnya pada misi ke - 1, yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Berahlak Mulia Berbudaya Sehat dan Cerdas”**.

Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Banten menetapkan Misi 2023 - 2026 sebagai berikut :



3.3.3 KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta misi dan visi Dinas Sosial.

Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2023 – 2026 pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

1. **Misi “Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pengembangan Kompetensi Dasar serta Meningkatkan Pelayanan Terbaik bagi Penerima Manfaat melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana”**. Mempunyai arahan kebijakan untuk “Meningkatkan pemetaan Kesejahteraan Sosial (

PMKS) meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin serta meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam proses pemanfaatan hasil pembangunan

2. **Misi “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengelolaan dan Pengintegrasian Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan”**, dengan arah kebijakan untuk “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Dinas Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial”

3.3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Berdasarkan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Banten Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang akan memasuki tahun ke - 1 (Satu), maka program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk tahun 2022 sejumlah 5 (Lima) program, sebagai berikut :

➤ DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pemberdayaan Sosial;

- 1) Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 2) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

3 Program Rehabilitasi Sosial;

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
- 4) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti

4 Program Perlindungan Sosial;

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

5 Program Penanganan Bencana;

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

➤ UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

➤ **UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
- 2) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 merupakan dokumen yang acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 dapat dilihat pada table 4.1 . berikut;

PROVINSI BANTEN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023						PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.608.871.400					99.608.871.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				99.608.871.400					99.608.871.400	
DINAS SOSIAL					93.792.996.900					93.792.996.900	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100 %	33.438.679.600		Pendapatan Asli Daerah		100 %	33.438.679.600	
1.06.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	586.150.500				100 %	586.150.500	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	400.110.500				9 Dokumen	400.110.500	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	25.440.000				1 Dokumen	25.440.000	
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	25.440.000				1 Dokumen	25.440.000	
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	16.440.000				1 Dokumen	16.440.000	
1.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	16.440.000				1 Dokumen	16.440.000	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	57.630.000				12 Laporan	57.630.000	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	44.650.000				5 Dokumen	44.650.000	
1.06.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	20.183.185.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	20.183.185.000	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		77 Org/Bln	19.450.000.000				77 Org/Bln	19.450.000.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	649.230.000				1 Dokumen	649.230.000	
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5 Dokumen	74.265.000				5 Dokumen	74.265.000	
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	5.400.000				1 Dokumen	5.400.000	
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	1.100.000				2 Laporan	1.100.000	
1.06.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen	990.000				2 Dokumen	990.000	
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1.100.000				1 Laporan	1.100.000	
1.06.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	1.100.000				2 Dokumen	1.100.000	
1.06.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	21.030.000				100 %	21.030.000	
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	10.300.000				2 Dokumen	10.300.000	
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	6.090.000				1 Laporan	6.090.000	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	4.640.000				1 Laporan	4.640.000	
1.06.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	85.999.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	85.999.000	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	61.950.000				1 Paket	61.950.000	
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		77 Orang	18.150.000				77 Orang	18.150.000	
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		77 Orang	5.899.000				77 Orang	5.899.000	

			ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023						PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023		
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.608.871.400					99.608.871.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				99.608.871.400					99.608.871.400	
DINAS SOSIAL					93.792.996.900					93.792.996.900	
1.06.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2.067.248.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	2.067.248.000	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.030.000				1 Paket	1.030.000	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	167.055.200				1 Paket	167.055.200	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	32.909.000				1 Paket	32.909.000	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	655.184.000				1 Paket	655.184.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1.100.000.000				1 Paket	1.100.000.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	105.993.000				1 Laporan	105.993.000	
1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	5.076.800				1 Dokumen	5.076.800	
1.06.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	743.305.850		Pendapatan Asli Daerah		100 %	743.305.850	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		- Unit	-				- Unit	-	
1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	3.512.100				1 Unit	3.512.100	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	92.836.000				1 Paket	92.836.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	646.957.750				10 Unit	646.957.750	
1.06.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5.563.354.800		Pendapatan Asli Daerah		100 %	5.563.354.800	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	380.404.800				1 Laporan	380.404.800	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	5.182.950.000				1 Laporan	5.182.950.000	
1.06.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4.188.406.450		Pendapatan Asli Daerah		100 %	4.188.406.450	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		3 Unit	115.230.000				3 Unit	115.230.000	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	313.820.000				20 Unit	313.820.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		112 Unit	76.320.000				112 Unit	76.320.000	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	3.063.592.200				5 Unit	3.063.592.200	
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	619.444.250				1 Unit	619.444.250	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial		100 %	1.879.902.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.879.902.000	
1.06.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100 %	187.812.000				100 %	187.812.000	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		1 Dokumen	187.812.000				1 Dokumen	187.812.000	
1.06.02.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		100 %	1.692.090.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.692.090.000	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		850 Orang	737.358.250				850 Orang	737.358.250	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		155 Orang	558.000.000				155 Orang	558.000.000	
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		30 Keluarga	312.840.000				30 Keluarga	312.840.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		7 Lembaga	83.891.750				7 Lembaga	83.891.750	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023						PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.608.871.400					99.608.871.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				99.608.871.400					99.608.871.400	
DINAS SOSIAL										93.792.996.900	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota		100 %	75.000.000			Pendapatan Asli Daerah	100 %	75.000.000	
1.06.03.1.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		100 %	75.000.000				100 %	75.000.000	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota		60 Orang	75.000.000				60 Orang	75.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial		100 %	5.554.094.200				100 %	5.554.094.200	
1.06.04.1.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		100 %	1.343.426.000			Pendapatan Asli Daerah	100 %	1.343.426.000	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		600 Orang	300.000.000				600 Orang	300.000.000	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		50 Orang	357.300.000				50 Orang	357.300.000	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		60 Orang	174.004.000				60 Orang	174.004.000	
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		40 Orang	484.622.000				40 Orang	484.622.000	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		1 Dokumen	27.500.000				1 Dokumen	27.500.000	
1.06.04.1.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		100 %	453.872.000			Pendapatan Asli Daerah	100 %	453.872.000	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		600 Orang	300.000.000				600 Orang	300.000.000	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		- Orang	-				- Orang	-	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		16 Orang	10.500.000				16 Orang	10.500.000	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		16 Orang	58.926.000				16 Orang	58.926.000	
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi		30 Orang	44.640.000				30 Orang	44.640.000	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		1 Dokumen	39.806.000				1 Dokumen	39.806.000	
1.06.04.1.03	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		100 %	3.092.682.000			Pendapatan Asli Daerah	100 %	3.092.682.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		600 Orang	2.700.000.000				600 Orang	2.700.000.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		270 Orang	190.228.000				270 Orang	190.228.000	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		16 Orang	11.200.000				16 Orang	11.200.000	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		16 Orang	63.726.000				16 Orang	63.726.000	
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	127.528.000				1 Dokumen	127.528.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023						PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.608.871.400					99.608.871.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				99.608.871.400					99.608.871.400	
DINAS SOSIAL					93.792.996.900					93.792.996.900	
1.06.04.1.05	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		100 %	664.114.200		Pendapatan Asli Daerah		100 %	664.114.200	
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		180 Orang	521.939.000				180 Orang	521.939.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal		125 Orang	124.675.000				125 Orang	124.675.000	
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		1 Dokumen	17.500.200				1 Dokumen	17.500.200	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal		100 %	51.563.567.300		Pendapatan Asli Daerah		100 %	51.563.567.300	
		Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial		100 %					100 %		
		Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS		100 %					100 %		
		Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		100 %					100 %		
1.06.05.1.01	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		100 %	50.000.000				100 %	50.000.000	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		5 Orang	25.000.000				5 Orang	25.000.000	
1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		5 Orang	25.000.000				5 Orang	25.000.000	
1.06.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		100 %	51.513.567.300		Pendapatan Asli Daerah		100 %	51.513.567.300	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi		27.500 Keluarga	31.632.052.300				27.500 Keluarga	31.632.052.300	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		100 Keluarga	704.609.000				100 Keluarga	704.609.000	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi		720 Orang	19.176.906.000				720 Orang	19.176.906.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi		100 %	1.281.753.800		Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.281.753.800	
1.06.06.1.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		100 %	1.281.753.800		Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.281.753.800	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakananan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakananan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi		400 Orang	259.530.800				400 Orang	259.530.800	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi		300 Orang	111.100.000				300 Orang	111.100.000	
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi		120 Unit	529.184.800				120 Unit	529.184.800	
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		400 Orang	266.359.200				400 Orang	266.359.200	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi		300 Orang	115.579.000				300 Orang	115.579.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023			PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023				
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.608.871.400					99.608.871.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				99.608.871.400					99.608.871.400	
DINAS SOSIAL										93.792.996.900	
UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL								Pendapatan Asli Daerah		3.167.542.800	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100 %	916.487.800				100 %	916.487.800	
1.06.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100 %	21.030.000				100 %	21.030.000	
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	15.030.000				2 Dokumen	15.030.000	
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	3.000.000				1 Laporan	3.000.000	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	3.000.000				1 Laporan	3.000.000	
1.06.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100 %	259.586.000			Pendapatan Asli Daerah	100 %	259.586.000	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	75.994.000				1 Paket	75.994.000	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	39.959.000				1 Paket	39.959.000	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	39.340.000				1 Paket	39.340.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	49.773.000				1 Paket	49.773.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	54.520.000				1 Laporan	54.520.000	
1.06.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100 %	136.936.600			Pendapatan Asli Daerah	100 %	136.936.600	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	136.936.600				10 Unit	136.936.600	
1.06.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100 %	135.833.400			Pendapatan Asli Daerah	100 %	135.833.400	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	107.554.400				1 Laporan	107.554.400	
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	28.279.000				1 Laporan	28.279.000	
1.06.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100 %	363.101.800			Pendapatan Asli Daerah	100 %	363.101.800	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	105.441.800				8 Unit	105.441.800	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		17 Unit	58.940.000				17 Unit	58.940.000	
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	198.720.000				1 Unit	198.720.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Pant		100 %	2.251.055.000			Pendapatan Asli Daerah	100 %	2.251.055.000	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Pant		100 %					100 %		
1.06.04.1.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant pada UPTD Perlindungan Sosial		100 %	720.685.000			Pendapatan Asli Daerah	100 %	720.685.000	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		25 Orang	310.641.300				25 Orang	310.641.300	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		25 Orang	57.830.300				25 Orang	57.830.300	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi		25 Orang	42.009.700				25 Orang	42.009.700	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		25 Orang	114.300.000				25 Orang	114.300.000	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan		25 Orang	7.906.100				25 Orang	7.906.100	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		25 Orang	132.582.000				25 Orang	132.582.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023			PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023				
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
DINAS SOSIAL											
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		25 Orang	17.230.000				25 Orang	17.230.000	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		1 Dokumen	38.185.600				1 Dokumen	38.185.600	
1.06.04.1.03	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial		100 %	1.530.370.000		<i>Pendapatan Asli Daerah</i>		100 %	1.530.370.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		60 Orang	1.071.514.800				60 Orang	1.071.514.800	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		60 Orang	195.066.100				60 Orang	195.066.100	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		60 Orang	81.587.200				60 Orang	81.587.200	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		60 Orang	71.336.900				60 Orang	71.336.900	
1.06.04.1.03.08	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi		10 Orang	720.000				10 Orang	720.000	
1.06.04.1.03.09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		60 Orang	17.236.800				60 Orang	17.236.800	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		18 Orang	63.000.000				18 Orang	63.000.000	
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Facilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	29.908.200				1 Dokumen	29.908.200	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL							<i>Pendapatan Asli Daerah</i>				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100 %	1.548.276.700				100 %	1.548.276.700	
1.06.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100 %	21.030.000				100 %	21.030.000	
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	12.550.000				2 Dokumen	12.550.000	
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	3.120.000				1 Laporan	3.120.000	
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5.360.000				1 Laporan	5.360.000	
1.06.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100 %	149.122.600		<i>Pendapatan Asli Daerah</i>		100 %	149.122.600	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Dokumen	11.666.700				1 Dokumen	11.666.700	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Dokumen	11.496.900				1 Dokumen	11.496.900	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Dokumen	40.590.000				1 Dokumen	40.590.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Dokumen	28.589.000				1 Dokumen	28.589.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	56.780.000				1 Laporan	56.780.000	
1.06.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100 %	114.202.800				100 %	114.202.800	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit	114.202.800				9 Unit	114.202.800	
1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		- Unit	-				- Unit	-	
1.06.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100 %	123.540.000		<i>Pendapatan Asli Daerah</i>		100 %	123.540.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	102.327.000				1 Laporan	102.327.000	
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	21.213.000				1 Laporan	21.213.000	

			ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023						PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023		
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.608.871.400					99.608.871.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				99.608.871.400					99.608.871.400	
DINAS SOSIAL					93.792.996.900					93.792.996.900	
1.06.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100 %	1.140.381.300		Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.140.381.300	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	61.800.000				6 Unit	61.800.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	23.081.300				25 Unit	23.081.300	
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	1.055.500.000				2 Unit	1.055.500.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti		100 %	1.100.055.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.100.055.000	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti		100 %				100 %			
1.06.04.1.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100 %	556.280.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	556.280.000	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		30 Orang	116.505.000				30 Orang	116.505.000	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		30 Orang	70.000.000				30 Orang	70.000.000	
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		30 Orang	10.060.000				30 Orang	10.060.000	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		30 Orang	294.563.000				30 Orang	294.563.000	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		1 Dokumen	65.152.000				1 Dokumen	65.152.000	

			ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023						PERKIRAAN ANGGARAN PERUBAHAN 2023		
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN	CATATAN PENTING
1	2	3	5	5	7	7	3	7	5	7	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.608.871.400					99.608.871.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				99.608.871.400					99.608.871.400	
DINAS SOSIAL					93.792.996.900					93.792.996.900	
1.06.04.1.04	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100 %	543.775.000		Pendapatan Asli Daerah		100 %	543.775.000	
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		40 Orang	100.680.000				40 Orang	100.680.000	
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		40 Orang	103.770.000				40 Orang	103.770.000	
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		40 Orang	4.800.000				40 Orang	4.800.000	
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		40 Orang	27.400.000				40 Orang	27.400.000	
1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		40 Orang	259.537.500				40 Orang	259.537.500	
1.06.04.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi		17 Orang	2.850.000				17 Orang	2.850.000	
1.06.04.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		40 Orang	6.300.000				40 Orang	6.300.000	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	17.000.000				1 Dokumen	17.000.000	
1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			21.437.500					21.437.500	
JUMLAH					99.608.871.400		-		-	99.608.871.400	-

BAB V

PENUTUP

4.1. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai pedoman dan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal.

Untuk Tahun 2023 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Belanja Langsung (BL), yaitu : Urusan Wajib dan Program Sosial mencakup 6 Program dan 32 Kegiatan serta Belanja Tidak Langsung (BTL) mencakup 1 Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta bahan evaluasi tingkat keberhasilan tolok ukur kinerja kegiatan sehingga dapat mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas.

Kami menyadari, dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik serta saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan.

Serang, 7 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BANTEN



Dr. NURHANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641010 198902 2 002